

INVENTARISASI ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI OLEH BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Oleh : Nurul Jannatul Putri

Pembimbing: Mimin Sundari Nst, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Aset memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah. Ada pun rumusan permasalahan pada penelitian adalah Bagaimanakah inventarisasi aset daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti? Apakah hambatan dalam inventarisasi aset daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inventarisasi aset daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui hambatan dalam inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya terkait dengan inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, diambil kesimpulan yaitu kegiatan inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui bahwa masih belum terlaksananya dengan baik kegiatan inventarisasi aset serta terdapat hambatan terkait inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Sumberdaya manusia dan Kinerja yang rendah.

Kata Kunci: Inventarisasi, Aset, Pengelolaan Keuangan

Abstract

Assets have a very strategic role in supporting the implementation of the main tasks and functions of local government. The availability of assets that suit the needs will directly improve the performance of local government organizations. There is also a formulation of the problem in the research is How is the inventory of regional assets at the Regional Asset Management Revenue Agency of the Meranti Islands Regency? What are the obstacles in the inventory of regional assets at the Regional Asset Management Revenue Agency of the Meranti Islands Regency?. This study aims to find out how to inventory regional assets at the Regional Asset Management Revenue Agency of the Meranti Islands Regency and to find out the obstacles in the regional asset inventory of Meranti Islands Regency. In this study the authors used a qualitative research type. Based on the results of the research and discussion that was carried out in the previous chapter related to the inventory of regional assets of the Meranti Islands Regency by the Meranti Islands Regency Regional Asset Management Revenue Agency, the conclusion was drawn that the activity of inventorying regional assets of Meranti Islands Regency by the Meranti Islands Regency Regional Asset Management Revenue Agency found that asset inventory activities have not been properly implemented and there are obstacles related to the Meranti Islands Regency regional asset inventory by the Regional Asset Management Revenue Agency Meranti Islands Regency, namely human resources and low performance.

Keywords: *Inventory, Asset, Financial Management*

PENDAHULUAN

Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumendan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya. Dalam aspek yang lain, aset pemerintah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah. Sarana dan prasarana merupakan kelengkapan dan kemudahan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola ataupun dipelihara dan dijaga dengan baik serta digunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan dinas atau pun kepentingan dalam melayani masyarakat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah, bahwasanya Pengelolaan Barang Milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan aset daerah lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pasal 6 menyebutkan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang melaksanakan pembukuan BMD, Pembukuan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat BMD ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Sedangkan pasal 8 menyebutkan Pengelola Barang harus melakukan

pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang untuk selanjutnya menyampaikannya kepada Pengelola Barang. Penggolongan dan kodefikasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan di bidang penggolongan dan kodefikasi BMD. Adapun tata cara pembukuan atau pencatatan BMD Kabupaten Kepulauan Meranti (1) Membukukan dan mencatat hasil Inventarisasi ke dalam Buku Barang, Daftar Barang, dan/atau KIB. (2) Melakukan reklasifikasi ke dalam DBKP-Barang Rusak Berat/Barang Hilang terhadap BMD dalam kondisi rusak berat/hilang dan telah dimohonkan nganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Bupati melalui Pengelola Barang. Inventarisasi aset dilakukan oleh pemerintah daerah agar aset-aset yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dan benar serta sebagai acuan untuk dilakukannya penilaian. Salah satu tujuan dari penilaian aset daerah adalah untuk kepentingan penyusunan neraca pemerintah dan laporan arus kas. Neraca dan laporan arus kas tersebut merupakan bentuk laporan bagi pemerintah daerah, yang di dalamnya mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah. Laporan pertanggungjawaban daerah yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat publik tertuang dalam neraca. Berdasarkan SOP inventarisasi barang milik daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,

Inventarisasi aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menghimpun KIB dan Buku Inventaris

dari pengguna barang sehingga di dalam buku induk inventaris aset yang dibukukan tidak jelas dan tidak transparan. Seperti tanah dan gedung dalam daftar aset dinyatakan tidak terinventarisasi. Tanah, gedung dan bangunan karena tidak membuat KIB menyebabkan jumlah aset tanah, gedung dan bangunan tidak sesuai dengan yang ada. Hal ini juga mengindikasikan inventarisasi aset daerah secara tidak langsung ditampilkan secara tidak transparan. Jumlah gedung dan bangunan serta tanah yang dimiliki tidak tercantum dengan jelas di daftar aset daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan fenomena di atas diketahui bahwa inventarisasi aset daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan semestinya. Pemerintah daerah belum sepenuhnya melaksanakan inventarisasi aset daerah dengan semestinya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah Kabupaten Meranti. Pengelolaan barang milik daerah penting dilakukan agar dapat diketahui kejelasan status kepemilikan BMD, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan PAD, antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik, pengamanan barang daerah, dasar penyusunan neraca, serta kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial

Creswell(2015).

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi, eksplorasi merupakan jenis penelitian awal dari suatu penelitian yang sifatnya sangat luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting dikarenakan akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Yusuf, (2004) mengemukakan tujuan penelitian eksplorasi merupakan tujuan untuk mendapatkan ide-ide mengenai permasalahan pokok secara lebih terperinci maupun untuk mengembangkan hipotesis yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inventarisasi Aset Daerah Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

a. Pendataan

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Dari hasil pengamatan lapangan dan wawancara dilakukan diketahui bahwa pendataan aset daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti pendataan dilakukan dengan kartu inventaris. Penggolongan pendataan aset daerah yang dimiliki kabupaten Kepulauan Meranti yakni terdiri dari Tanah, Peralatan dan mesin, Jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Pendataan dalam inventarisasi aset daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada aturan yang sudah ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

b. Pencatatan

Berdasarkan penjelasan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan pembukuan ialah suatu proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Dari hasil pengamatan lapangan dan wawancara diketahui bahwa Dalam melakukan pencatatan dilakukan dalam bentuk kartu inventaris. Kegiatan pembukuan Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pencatatan barang milik daerah dimuat dalam Kartu Inventaris Barang(KIB).

c. Pelaporan hasil pendataan

Pelaporan ialah prosedur penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun selama 5 (lima) tahun kepada pengelola setelah dilakukannya inventarisasi dan pencatatan. Diketahui bahwa sebelum pelaporan dilakukan terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi guna mensahkan pelaporan dan memberikan kelegalitasan atas laporan tersebut. Dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara lapangan diketahui bahwa Pelaporan aset digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah yang dapat

disampaikan secara berjenjang sehingga dapat memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat. Pelaporan dilakukan sebagai salah satu proses pengelolaan inventaris aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Hambatan Dalam Inventarisasi Aset Daerah Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hambatan terkait inventarisasi aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana uraian berikut:

a. Sumber daya Manusia

Sumberdaya manusia yang lemah dilihat dari kurangnya sumberdaya manusia yang memadai yang karena hasil kerja tidak maksimal. Kinerja yang tidak maksimal diketahui bahwa tidak semua aset milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau terdata dengan baik. Dari informasi tersebut diketahui bahwa tidak banyak sumberdaya manusia di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki jenjang pendidikan perguruan tinggi. Dalam hal ini sebaiknya adanya perubahan pada sumberdaya manusia di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penunjang kinerja khususnya dalam Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Perubahan dengan diadakannya pelatihan terhadap pegawai maupun perekrutan pegawai karena sumber daya

manusia adalah sasaran utama dalam proses inventarisasi, sehingga saat sumberdaya manusia memadai, mampu mengembangkan sistem pengelolaan, pendataan dan pencatatan yang bisa diperbaharui gunakan mendapatkan hasil yang valid.

b. Kinerja yang rendah

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya dalam waktu tertentu. Kinerja juga merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh pegawai yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian terhadap pegawai atau organisasi. Diketahui bahwa terkait daya tanggap memiliki kekurangan dari ketepatan waktu namun dari sisi pemerintah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap berupaya bekerja dengan baik dan tepat waktu dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Namun yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu adanya evaluasi yang lebih guna memecahkan permasalahan yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya terkait dengan inventarisasi asset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Inventarisasi asset daerah pada kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum terlaksana dengan baik, dalam hal ini yang terjadi dilapangan terlihat masih banyak aset yang tidak di pergunakan dan tidak terdata dengan baik. Sebagaimana yang ditemukan di lapangan selama riset berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) Bragan, *Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: University Press, 1992)

Eka Fitriyani. 2020. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Pada Kota Administrasi Jakarta Timur). *Jurnal Administrasi*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Fais, Satrianegara, *Buku Ajar Organisasi Dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Serta Kebidanan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009) Fandy Tjiptono, *Strategi*

Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 1997) Hidayat, Muctar. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2012). Keban, Enam *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta :

Gaya Media, 2008) Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2009) Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.

Moenir, H.A.S., *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosda Karya, 2018) Pangabean. 2015. *Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian sengketa*. Pustaka Sin ar Harapan: Jakarta Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2006)

Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012) Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Unpar Press, 2006).

Simamora, Bilson, *Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif Dan Profitabel*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Sinambela, Lijan poltak, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan RnD Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018) Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)

Tangkilisan, Nogi Hessel, *Manajemen Publik*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana, 2005) Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Tahun 2007.

KEPMENPAN No. 81 tahun 1993